

PRO POOR BUDGET



Kebijakan anggaran dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Mengapa Anggaran Pro Rakyat Miskin

- *Secara konseptual, anggaran pro poor merupakan bagian (turunan) dari kebijakan yang berpihak pada kaum miskin (pro poor policy).*
- *Anggaran pro poor merupakan bentuk tindakan afirmatif dalam pengarusutamaan kemiskinan (poverty mainstreaming) dalam kebijakan pembangunan.*

Mengapa Anggaran Pro Rakyat Miskin

- *Anggaran pro poor mengkombinasikan tiga perspektif kemiskinan: struktural, gender dan institusional.*
- *Anggaran pro poor identik dengan anggaran yang demokratis. Kaum miskin dan perempuan mempunyai voice, akses dan kontrol dalam kebijakan anggaran (mulai dari perencanaan hingga evaluasi).*

PROBLEM KRITIS

- Kemiskinan rakyat tidak semata disebabkan oleh kurangnya modal agregat. Akan tetapi lebih disebabkan oleh karena :
 - a) Tidak meratanya penguasaan aset (modal) produksi dan
 - b) Kurangnya akses masyarakat miskin pada kebijakan penganggaran.

- Dua variabel faktor kemiskinan itu tentu berkait erat dengan tata kelola anggaran di tingkat daerah. Karena itu paradigma anggaran yang berpihak pada rakyat miskin (*pro poor budget*) menjadi mendesak ketika mencermati kebijakan anggaran daerah dewasa ini.

Arkeologi Anggaran Pro Poor

PRO
POLICIES:
Kebijakan
pembangunan
yang berpihak
pada si
miskin.

*People oriented
budget* atau
anggaran yang
berorientasi
pada
pemenuhan hak-
hak dasar
rakyat.

Anggran *pro
poor*
(Anggaran
yang berpihak
pada orang
miskin)

Kebijakan
anggaran yang
dampaknya dapat
meningkatkan
kesejahteraan dan
atau terpenuhinya
kebutuhan hak-hak
dasar masyarakat
miskin.

Dimensi Pro Poor Budget

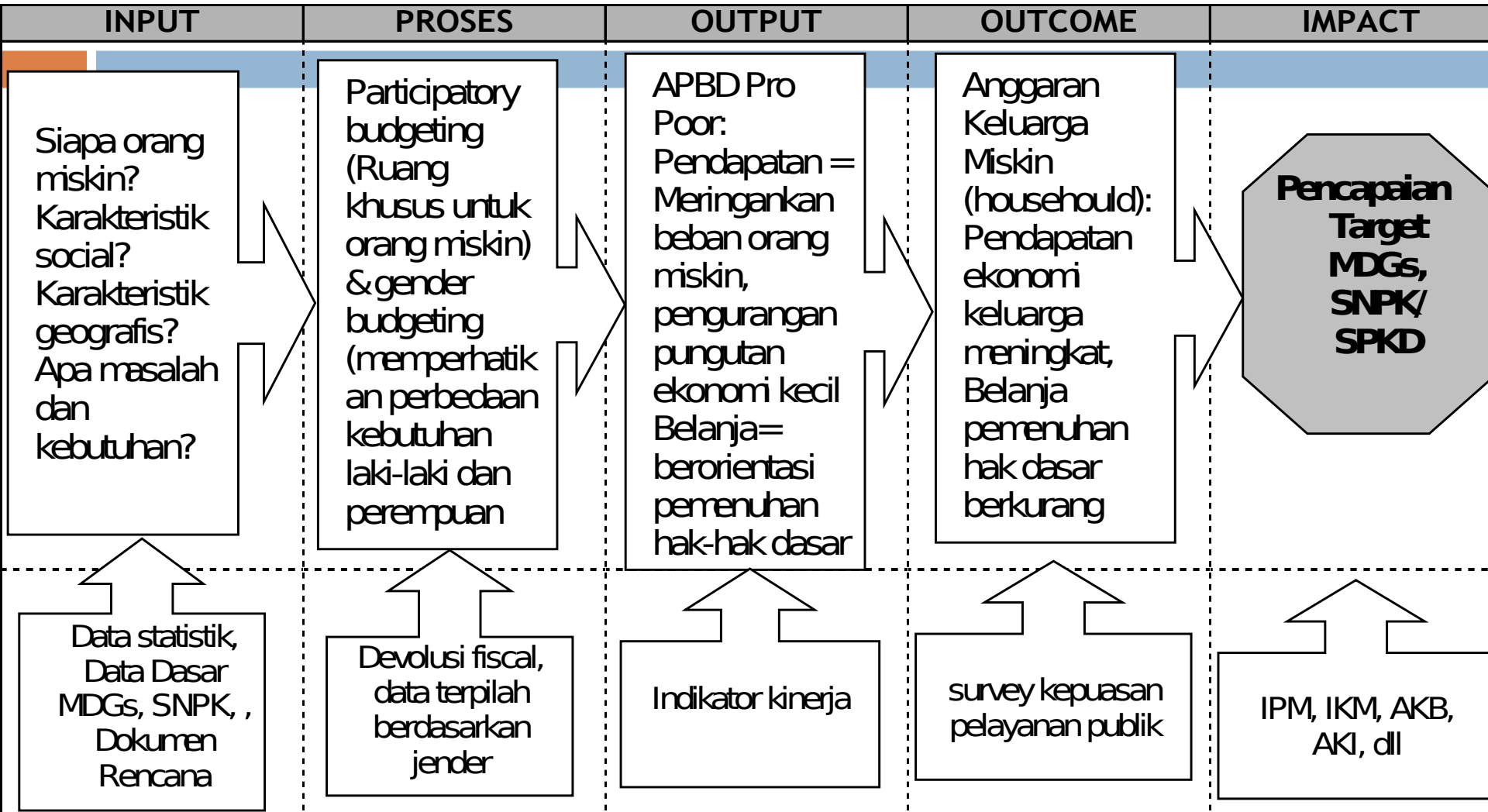
APBD/Pemerintah

- Pendapatan → Kemudahan Akses pelayanan dasar & Keringanan Pajak/Restribusi Usaha Ekonomi warga miskin
- Belanja → Memenuhi pencapaian target MDGs

Keluarga Miskin/APBKM

- Pendapatan Meningkat = Belanja pemenuhan Hak Dasar berkurang + Pendapatan Ekonomi Meningkat
- Belanja Berkurang = Pendapatan Ekonomi Meningkat + Belanja Hak Dasar berkurang

Kerangka Pro Poor Budget



Kriteria Kemiskinan Nasional (BPS)

1. Luas lantai per kapita (kurang dari 8 m² per orang)
2. Jenis lantai (tanah/bambu/kayu murahan)
3. Jenis dinding (bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester)
1. Fasilitas tempat buang air besar (tidak punya /umum/bersama)
2. Sumber air minum (sumur/mata air terlindung /sungai/air hujan)
3. Jenis bahan bakar untuk keperluan masak (kayu bakar/arang/minyak)
4. Jenis penerangan (bukan listrik)
5. Kebiasaan makan dalam sehari (hanya satu/ dua kali makan dalam sehari)
6. Kemampuan membeli daging/susu/ayam dalam seminggu (tidak pernah mengkonsumsi/hanya satu kali dalam seminggu)
7. Kemampuan membeli pakaian dalam setahun (tidak pernah membeli/hanya membeli 1 stel dalam setahun)
8. Kemampuan berobat ke puskesmas (tidak mampu membayar untuk berobat)
9. Tingkat pendidikan KRT (tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD)
10. Lapangan usaha (petani dengan luas lahan 0,5 ha/buruh tani/nelayan/buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah RP. 600.000 per rumahtangga per bulan)
11. Kepemilikan aset (tidak punya tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp.500.000 seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya)

Jumlah GAKIN Kota Ska

2004	2005	2006	2007	2008
32.529	32.529	29.038	26.982	26.913



Terima Kasih

